

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

GITA FITRIYANI

NPM : 1521020124

Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440H/2019M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

GITA FITRIYANI

NPM : 1521020124

Jurusan : Siyasah Syar'iiyyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Eko Hidayat., S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440H/2019M**

ABSTRAK

Sampah sebagai dampak dari pembangunan menuntut perhatian secara khusus dari pemerintah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, salah satunya dengan ditetapkannya Perda Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dibentuknya perda tersebut guna mengatur bagaimana cara pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandar Lampung.

Dari sedikit uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2015. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) berupa, Al-Quran, Hadist, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan *open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan *system sanitary landfill* namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu *system open dumping* yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan *fiqh siyasah* pelaksanaan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 05 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung)**

Nama : **GITA FITRIYANI**

NPM : **1521020124**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung 25 Juli 2019

Pembimbing I,

Dr. Susiadi A.S., M.Sos.I

NIP: 195808171993031002

Pembimbing II,

Eko Hidayat S.Sos., M.H

NIP: 197512302003121002

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

NIP: 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Tlp.(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO. 05 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh, **GITA FITRIYANI**, NPM : **1521020124**, program studi **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)**, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin / 12 Agustus 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.** (.....)



Dr. H. Khasnuddin, MH
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa: 59)¹

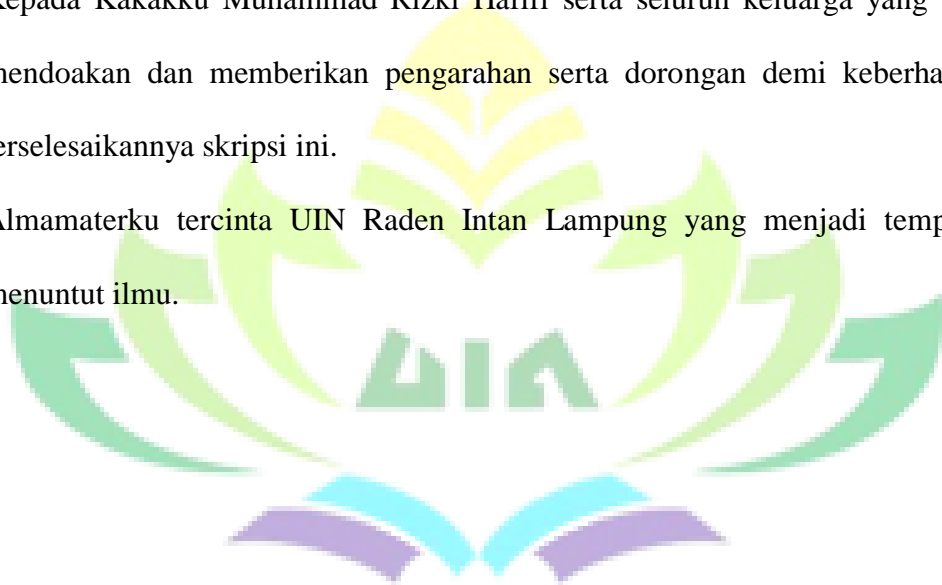


¹Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-nisa ayat 59 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).

PERSEMBAHAN

Dengan kridhoan hati dan rasa bersyukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Bpk. Juhaidi dan Ibu Rosimah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Kepada Kakakku Muhammad Rizki Hafifi serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan pengarahan serta dorongan demi keberhasilan terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Gita Fitriyani dilahir di Teluk Betung, kecamatan bumi waras, Bandar Lampung pada tanggal 26 Januari 1997. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dengan saudara kandung laki-laki bernama Muhammad Rizki Hafifi. Lahir dari pasangan suami istri ayahanda Juhaidi dan Ibunda Rosimah, Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bakung dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 15 Bandar Lampung selesai pada tahun ajaran 2012, SMK Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I Tahun Akademik 2015/2016

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam menjalankan Perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 25 Juli 2019
Yang Membuat,

GITA FITRIYANI
1521020124

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, parasahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah rela berkorba nuntuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridho ioleh ALLAH SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul skripsi ini Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), pada Program Strata satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.

2. Dekan Fakultas Syariah Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H dan sekretaris jurusan Frenki M.Si
4. Pembimbing I Drs. Susiadi AS., M. Sos.I dan pembimbing II Eko Hidayat. S.Sos., M.H yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepala perpustakaan Fakultas Syariah, dan Kepala perpustakaan Daerah kota Bandar lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung beserta staf-staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Sahriwansah,SE dan bapak Khenderi, SH selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Jajaran Pegawai serta instansi yang terkait di Dinas Lingkungan Hidup, yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.

10. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2015 khususnya Siyasah Kelas B yang telah bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita.
11. Serta rasa terimakasih ini saya ucapkan berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung, demi terwujudnya kelulusan ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung, 25 Juli 2019

Penulis

GITA FITRIYANI
NPM: 1521020124

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	14
E. Rumusan masalah.....	14
F. Tujuan Penelitian.....	15
G. Signifikasi Penelitian.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	26
1. Fiqh siyasah	
a) Pengertian Fiqh Siyasah	26
b) Objek Kajian Fiqh Siyasah	27
c) Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah.....	32
2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015	
a) Pengertian Pengelolaan Sampah.....	37
b) Metode Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	40
B. Tinjauan Pustaka.....	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	48
C. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	50
	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.....	64
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Input Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pangkat/Golongan.....	55
2. Data Input Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pendidikan.....	55
3. Data Input Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Tempat Kerja.....	56
4. Data Input Jumlah Pegawai Sesuai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahan pahaman dalam memberikan pengertian para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³
3. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan.
4. Peraturan Daerah (PERDA) merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),h.1470

³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-kontekstualisasi Doktrin Politik islam* (Indonesia: Pranadamedia Group, 2014),h.4

sendiri terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴

5. Pengelolaan Sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan dasar yang membuat penulis ingin memilih skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung seperti yang sudah diatur didalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011),h.104

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini didalam UIN Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang masalah ini.
- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

C. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.”⁵ Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.

⁵Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

Pada alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶ Pengamalan pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh *stake holder* dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut salah satunya adalah dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat . membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”⁷

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang

⁶Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, alenia ke IV

⁷ Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28 H ayat (1)

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan UU tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. UU Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse), dan daur ulang sampah (recycle) agar volume sampah tidak terus bertambah.⁸

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2(dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.⁹

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Th 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Th 2010, *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*

Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah ditempat pemrosesan Akhir.¹⁰

Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga,¹¹ Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam.

Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah sesuai dengan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*, pasal 1 angka (1)

¹¹ Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Bandar Lampung, pasal 4

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. Dalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 sistem pengelolaan sampah diatur dalam pasal 21 dan 22 yang berbunyi “penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penangan sampah. pemilahan dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya.”¹²

Pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan di Kota Bandar Lampung masih terbatas pada sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah dan akhirnya dibuang ke tempat Pembuangan Akhir. Fungsi tempat pembuangan akhir semestinya bukan hanya merupakan tempat pembuangan akhir sampah tetapi dapat menjadi tempat pengelolaan sampah yang dapat mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai lebih.

Pada umumnya sampah diartikan sebagai barang buangan hasil aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam dan selalu menghasilkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Jika kita menganggap bahwa sampah adalah sebuah peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian, tentu saja sampah tersebut tidak begitu saja dibuang, melainkan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu usaha yang baik.

¹² *Ibid*, pasal (21) dan pasal (22).

Sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik.

Salah satu upaya pemanfaatan sampah adalah dengan melakukan daur ulang sampah organik dengan penekanan pada proses pengkomposan. Pengkomposan merupakan suatu teknik pengelolaan limbah padat yang mengandung bahan organik *biodegradable* (dapat diuraikan mikroorganisme). Selain menjadi pupuk organik, kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air serta zat-zat hara lain.

Untuk mengatasi permasalahan sampah pemerintah dalam melakukan pengurangan dan penanaman sampah sebagaimana dalam pasal 20 mengenai pembatasan, pendaurulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, pemerintah membentuk lembaga pengelola persampahan di tingkat rumah tangga, tingkat rukun warga, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan.

Pemerintah juga diwajibkan menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja, penyediaan TPS, TPST, dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan penyediaan TPS, TPST dan TPA harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, hal ini tertuang di dalam Pasal 27.¹³ Dalam pelaksanaan pengelolaan, kewajiban pemerintah juga dijelaskan dalam pasal 16 yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemeliharaan,

¹³ *Ibid*, pasal (27)

Pengembangan, Penyediaan sarana, melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah di TPS, TPST, dan TPA”. Dan dalam pasal 17 juga menjelaskan bahwa setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.¹⁴

Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penghasil sampah, hal tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat (2) yang berbunyi “bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.”¹⁵

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebarkan penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 pada pasal 58 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak ikut berpartisipasi

¹⁴*Ibid*, pasal 27, 16, dan 17

¹⁵*Ibid*, 40 ayat (2)

dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).¹⁶ Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. Kedua, Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga

¹⁶*Ibid*, pasal 58

masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁷ Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam *Fiqh Siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

¹⁷Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm50

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 59)¹⁸.*

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif¹⁹ Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya..²⁰

Untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia yang heterogen dan bervariasi diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang adil supaya dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁸ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press 1993), hlm.48.

²⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenana, 2003), hlm 48.

Artinya : *“sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”* (QS.An-Nisa : 58)²¹

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:²²

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negeranya juga harus berdasarkan.²³

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat

²¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-nisa ayat 58 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

²² Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm.9.

²³ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.30

5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, dan melihat analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan *fiqh siyasah* pada upaya pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015, dan diharapka dapat menjadi sambungan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh di dalam lingkungan sosial, baik di dalam negeri maupun

hubungan antar Negara yang menjalin kerja sama serta dapat memberikan manfaat teoritik yang luas.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dari penafsiran fakta-fakta.²⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tatacara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Adapun metode penilaian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian dalam skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikelompokkan dalam dua tipe utama yaitu kuantitatif dan kualitatif yang masing-masing terdiri dari atas beberapa jenis penelitian.²⁵

- 1) Penelitian kuantitatif, merupakan penelitian empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung/angka. Penelitian kuantitatif

²⁴Cholid Norobuko dan Ahmadi, *metode penelitian* (Jakarta: Pt. Bumi aksara,1997),h.1

²⁵Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta,2010),h13

memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik.²⁶

- 2) Penelitian kualitatif, adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁷

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.²⁸

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen,

²⁶Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) ,h.14

²⁷Lexy J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2014).h,4

²⁸Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta,2010),h13

catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.²⁹

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang diatur dalam PERDA No. 05 Tahun 2015 di Kota Bandar Lampung. Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan sendiri yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.³⁰

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³¹

a. Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.³² Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi

²⁹*ibid.*

³⁰ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h. 240

³¹ Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 1996), h. 44

³² Zinnuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 106.

sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa aparat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).³³ Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, website, buku-buku yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*, dokumen yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Berikut ini penjelasan Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan

³³*ibid.*

sebagainya.³⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Sekretariat Dinas yang berjumlah 79 orang , Supir truck sampah yang berjumlah 117 , petugas sapu yang berjumlah 268 orang, petugas pengelola sampah di TPA yang berjumlah 17, dan 1 orang Operator Alat Berat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.³⁵ Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah non probability sampling, non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, snowball.³⁶

Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik yang berdasarkan pada cirri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 5 orang, yang dimana terdiri dari 1 orang anggota sekretariat dinas, 1 orang supir truck sampah, 1 orang staf petugas sapu, 1 staf petugas pengelola sampah di TPA, dan 1 orang adalah

³⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.81.

³⁵ Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung,1996),h.44

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010), h.10

³⁷ Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.89.

operator alat berat, penulis mengambil sampel tersebut karena sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik Purposive Sampling.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.³⁸ Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kreadibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut :³⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁴⁰

Wawancara disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden

³⁸Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta,2010),h.14

³⁹ Lexy J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2014),h.240

⁴⁰Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.107

untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden.

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat di Kota Bandar Lampung untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang pengelolaan sampah dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Wawancara yang akan digunakan adalah bentuk *interview* bebas terpimpin, artinya *interviewer* didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan *interview*, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh *interviewer*.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁴¹ Observasi disini adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang di obsevasi secara aktif.

⁴¹Riduwan, *metode riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.104

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁴² Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.⁴³ Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.⁴⁴
- b. Rekontruksi data, adalah pengambilan sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan sistematis.⁴⁵

⁴²Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.115.

⁴³Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015), h.122.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),h 39.

c. Sistematis data, adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.⁴⁶

6. Analisis Data

Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁷

Setelah data di peroleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

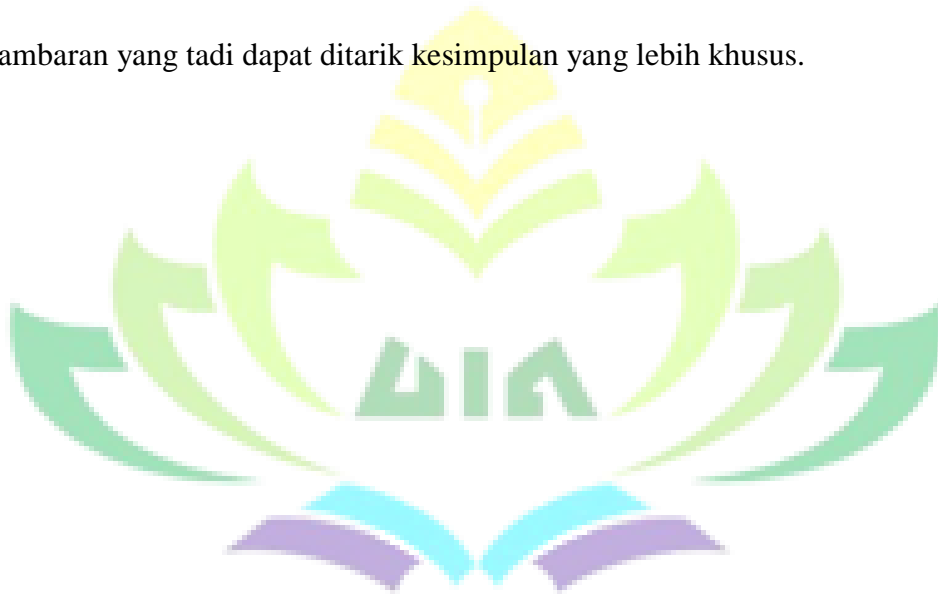
Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004), h. 126.

⁴⁷Lexy J.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2014),h.248

pengetahuan, dalam menganalisis dan digunakan kerangka berpikir secara Deduktif.

Metode Deduktif yaitu suatu cara berpikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. Penulis maksud ini yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Bandar Lampung. Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu dibandingkan dengan peraturan yang telah ada yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Fiqh Siyasah

a) Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam”.⁴⁸ *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴⁹ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).⁵⁰

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁵¹ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara

⁴⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.2

⁴⁹Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo,1994), h.21.

⁵⁰*Ibid.* h.22.

⁵¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.3

terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵²

b). Objek Kajian Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 4) *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- 5) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).

⁵² *Ibid*, h. 27

- 2) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- 3) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 4) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan)
- 2) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- 3) Keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).

8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁵³

Adapun objek kajian *fiqh siyasah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau *siyasah maliyah* (*politik ekonomi*), di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyah*, di bidang kenegaraan atau *siyasah dauliyah*, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵⁴

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil

⁵³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 14

⁵⁴<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2019).

kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing , tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁵⁶

Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kajian tentang konsep *imamah*, *khalifah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h.53

⁵⁶*Ibid.* h. 77.

- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- 3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- 4) Kajian tentang *waliul ahdi*;
- 5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- 6) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- 7) Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.⁵⁷

Kajian-kajian di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian *siyasah dusturiyah*, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.

Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*.

⁵⁷Juhaya.S.Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia 2014), h.40

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sacral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'at*. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi* disebut sebagai *siyasah taufidiyah*.⁵⁸

c. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Berikut ini adalah dasar hukum *siyasah dusturiyah* :

1). Al-qur'an

Al-qur'an, adalah sumber pokok aturan islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁹ Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* ialah:

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h. 273.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka dia antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa Ayat 29)⁶⁰

2). Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶¹ Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. AbuDaud No. 2241).

3). Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan

⁶⁰Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-nisa ayat 29 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).

⁶¹Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010).h.53

ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁶² Adapun dalil al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 59)⁶³

4). Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satudengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁶⁴ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya

⁶² *Ibid.h. 54.*

⁶³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).

⁶⁴ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.56.

sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi 3 yaitu :

a). *Qiyas al-aulawi*

Qiyas al-aulawi adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.⁶⁵

b). *Qiyas al-mushawi*

Qiyas al-mushawi adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). Imam syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan.⁶⁶ Ada ulama yang berpendapat seperti ini, “yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”.

⁶⁵ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, h. 350.

⁶⁶ *Ibid*, h. 51

Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna padanash yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma’na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

c). *Qiyas al-adna*

Qiyas al-adna adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far’*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risalah*, Imam Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.”

Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al ma’na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas alsyaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib asy-syafi’i* ia menegaskan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah dari pada *illat* pada hukum asal.⁶⁷

⁶⁷*Ibid*, h.356

2 . Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

No.05 Tahun 2015

a. Pengelolaan Sampah

1) Definisi Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sampah yang dimaksud merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.⁶⁸ Jadi mengacu dari penjelasan ini sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak dipakai dan tidak dibutuhkan atau bahkan tidak disenangi lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan sampah. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:

⁶⁸Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Bandar Lampung, pasal 4

- a). Adanya sesuatu benda atau bahan padat.
- b). Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia.
- c). Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi.

2). Jenis-jenis Sampah

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu:

- a). Sampah alam yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b). Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vector (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi.
- c). Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan industri.

d). Sampah Industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.

Sampah berdasarkan sifatnya, ada dua macam, yaitu Organik dan Anorganik, yaitu :

a). Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

b). Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas minuman, kaleng.

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk padat dan cair, berikut penjelasannya:

a). Sampah padat , adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran manusia, dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

b). Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

b. Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015

Sampah (*refuse*) sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi yang bukan biologis karena *human waste* tidak termasuk di dalamnya dan umumnya bersifat padat karena air bekas tidak termasuk didalamnya.

Pencemaran yang paling nampak dan besar adalah produksi limbah padat. Dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya dalam pengelolaannya. Tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya sampah tetapi juga mempengaruhi lingkungan kehidupan dapat mengalami kerusakan. Jika sampah sangat mengganggu, mungkin itu juga dikarenakan salah manusia itu sendiri, karena terkadang manusia juga kurang arif dalam memperlakukannya. Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Sehingga mereka membuang sampah di sembarang tempat dan seenaknya saja . Maka dibuatlah aturan tentang pengelolaan sampah yang di atur dalam Peraturan daerah No 05 Tahun 2015.

Untuk pelaksanaan Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan,

kewajiban, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana.

Berikut penjelasannya:

1). Menimbang

Menimbang disini adalah alasan awal mengapa dibentuknya Peraturan Daerah tersebut. Dalam pertimbangan Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah adalah bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

2). Ruang Lingkup Peraturan

Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, atau berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

3). Kewajiban

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a) Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

- b) Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah.
- c) Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

4). Larangan

Setiap orang atau badan dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Bandar Lampung, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah kesungai, selokan got, saluran , jalan umum, tempat umum, trotoar dan ditempat umum lainnya.

5). Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa:

- a) Teguran/Peringatan
- b) Penyegehan
- c) Pencabutan/ Pembatalan Perizinan.

6) Ketentuan Pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 44 yang menjelaskan tentang larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan di tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 pasal 19 bagian kedua dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ini diperjelas kembali dalam pasal berikutnya yaitu pasal 20 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan:⁶⁹

- a) pembatasan timbulan sampah;
- b) pendaur ulang sampah;
- c) pemanfaatan kembali sampah.

Dalam pasal 20 Ayat (2) menjelaskan dalam hal pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:⁷⁰

- a) pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

⁶⁹*Ibid*, Pasal 20 ayat 1

⁷⁰*Ibid*

b) fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Selanjutnya penangan sampah dalam peraturan daerah No 05 Tahun 2015 dijelaskan dalam pasal 21, dalam pasal tersebut menjelaskan penanganan sampah dilakukan dengan cara:⁷¹

- a) pewadahan dan pemilahan;
- b) pengumpulan;
- c) pengangkutan;
- d) pengolahan; dan
- e) pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, pemilahan dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.⁷²

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

⁷¹ *Ibid*, Pasal 21

⁷² *Ibid*

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan cara: ⁷³

- a. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;
- b) sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
- c) sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
- d) sampah dari fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA. Pengolahan sampah disini adalah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. ⁷⁴

Bagian terakhir adalah pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman. ⁷⁵

Pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, pengelolaan limbah padat (sampah) terdapat enam fungsi elemen yaitu timbulan sampah, penanganan sampah pada sumber, pengumpulan sampah dari sumbernya, pemisahan dan proses pengolahan pemindahan dan pengangkutan, serta pembuangan.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Seperti penelitian Muhammad Sa'dulah yang berjudul "Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)" yang dibuat pada tahun 2016 di Yogyakarta, dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang bagaimana cara menangani permasalahan sampah yang terjadi di Perkotaan namun yang membedakan dalam penelitian Muhammad Sa'dulah

menggunakan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan berdasarkan Fiqh lingkungan, sedangkan penulis menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dan ditinjau dari Fiqh Siyasah.⁷⁶

Selanjutnya skripsi karya Annisa Suciati dengan judul “Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)”⁷⁷ dalam skripsi ini membahas secara jelas tentang permasalahan sampah yang terjadi di TPA Sumur Batu yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat setempat seperti timbulnya penyakit kulit hingga gangguan pernafasan. Dalam skripsi Annisa Suciati dengan skripsi ini sama-sama menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai upaya dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi di kota-kota besar, dan yang membedakan skripsi Annisa Suciati dengan skripsi ini adalah penulis meninjau dari salah satu aspek hukum islam dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015.

Dengan demikian maka permasalahan sampah yang terjadi di berbagai daerah/kota harus sesegera mungkin untuk diatasi sebagai salah satu upaya dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi saat ini.

⁷⁶Muhammad Sa'dulah “*Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga 2016.

⁷⁷Annisa Suciati “*Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)*” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. oleh sebab itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota ini terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak Pada $5^{\circ}25'$ sampai dengan $5^{\circ}42'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}15'$ sampai dengan $105^{\circ}26'$ bujur timur. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan $169,21 \text{ km}^2$ yang terbagi kedalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.015.910 jiwa (berdasarkan data tahun 2007). Ibu Kota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

d. Sebelah Timur Berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Propinsi Lampung merupakan keresidenan sebelum tanggal 18 Maret 1964. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 1964, yang lalu menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Propinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjung Karang-Teluk Betung yang diganti menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dimulai sejak tanggal 17 juni 1983, dan pada tahun 1999 berubah menjadi Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 Kecamatan 30 Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat 1 Lampung Nomor G/185.B.111/HK/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan , Penghapusan dan Penggabungan kecamatan dan kelurahan, maka kota Bandar Lampug menjadi 13 Kecamatan dengan 98 kelurahan. Melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun tahun 2012 tentang peraturan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang semula berjumlah 98 kelurahan menjadi 126 kelurahan. Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH tingkat II berturut-turut sebagai berikut:

- a. SUMARSONO periode 1956-1957
- b. H. ZAINAL ABIDIN P.A periode 1957-1963
- c. ALIMUDIN UMAR, SH periode 1963-1969
- d. Drs. H. M THABRANI DAUD periode 1969-1976
- e. Drs. H. FAUZI SALEH periode 1976-1981
- f. Drs. H. ZULKARNAIN SUBING periode 1981-1986
- g. Drs. H.A NURDIN MUHAYAT periode 1986-1995
- h. Drs. H. SUHARTO periode 1996-2006
- i. EDY SUTRISNO, S.Pd, M.Pd. periode 2006-2010
- j. Drs. H. HERMAN HN, MM periode 2010 s.d sekarang.⁷⁸

B. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

1. Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung bertempat di Jalan Pulau Subesi No.89 Sukarame Bandar Lampung. Dasar hukum terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

⁷⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wali_Kota_Bandar_Lampung , diakses pada tanggal 25 maret 2019 pada pukul 19.00 Wib.

Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pengoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dibidang lingkungan hidup; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja Organisasi publik karena akan menjelaskan bagaimana kedudukan fungsi di dalam organisasi. Adapun Susunan Organisasi Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu terdiri dari:

a. Kepala Dinas: Sahriwansah, SE

Sekretariat: Khenderi, SH.

b. Sekretariat;

1) Sub Bagian Program dan informasi: Frisklya Anhraeni, S.STP.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Nasrobi Sugara, ST.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset : Dian Kusaprililia, SE

c. Bidang Tata Lingkungan : Ir. Arwan Arifin, M.M.

1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS : Yovita Agustina, S.T.

2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan : Ir. Endang Pujiastuty, M.Si

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup : Dina Marina, S.E.

d. Bidang Pengelolaan Sampah : Ismed Saleh, S.H.

1) Seksi Pengelolaan Sampah;

2) Seksi Sarana Prasarana Sampah : Djoko Indarto, S.E.

3) Seksi Pengembangan Teknologi dan inovasi Persampahan.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup :

Eddy,S.Sos.

1) Seksi Pemantauan Lingkungan :

2) Seksi Pencemaran Lingkungan : Dra. William Hartati

3) Seksi Kerusakan Lingkungan : Irman Latief, S.H.

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup : Cik Ali Ayub,
S.Sos., M.M.

1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup: Haris Fadilah, S.T., M.M.

2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan : Emron Yusmi, S.H., M.H.

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup : Yudian Putra Dinata, S.T.,
M.M.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

h. Kelompok Jabatan Fungsional.





4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Lampung Nomor 47 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan 1 orang sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 12 Kepala Seksi dan 14 orang Kepala UPT, dan 14 orang Kepala Tata Usaha UPT.

Table 1.
Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1	Golongan IV	15 orang
2	Golongan III	72 orang
3	Golongan II	94 orang
4	Golongan I	36 orang
5	Tenaga Kontrak	692 orang
Jumlah Total		909 orang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
		Honor	PNS
1	S2	-	10
2	S1	47	43
3	D4	1	-
4	D3	14	1
5	D1	1	-
6	SMA/MA/MAN	153	40
7	SLTA	1	1
8	SMK/SMEA/SMTI	78	7
9	STM/ST	6	2
10	SMP	73	9
11	SLTP	9	1
12	MTS	5	-
13	SD	131	29
14	Paket	56	7
15	-	120	67
Total		692	217

Jumlah Total	909
---------------------	------------

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Table 3.
Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Tempat Kerja

No	Uraian	Jumlah Pegawai		
		PNS	Kontrak	Jumlah
1	Sekretariat Dinas	26	53	79
2	pelaksana	34	-	34
3	Staf UPT	33	-	33
4	Ka. UPT dan Ka. Tu UPT	9	-	9
5	Operator alat berat	-	1	1
6	Petugas Retribusi	1	26	27
7	Supir	25	92	117
8	Kernet	37	193	230
9	Petugas TPA	-	17	17
10	Pet. Kebersihan/Sapu/Satgas	12	304	316
11	Pet. Bengkel/Jaga Malam	1	10	11
12	Petugas Tinja	1	3	4
13	Petugas Kali Bersih	-	25	25
14	Pramu Taman/ Pramu terbang	2	4	6
Jumlah Total		909		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Tabel 4.
Jumlah Pegawai Sesuai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negri Sipil

No	Sebutan	Jumlah
1	Sangat Baik	6
2	Baik	213
3	Cukup	1
4	Buruk	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai kontrak lebih banyak dari pada pegawai negri sipil (PNS), mayoritas tingkat pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup lulusan SMA/MA/MAN, jumlah petugas kebersihan/sapu/satgas lebih banyak dari pada bidang yang lain. Serta jumlah

kinerja para pegawai negeri sipil di Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan sebutan “baik” lebih banyak.

5. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan masyarakat Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman, sejahtera, maju dan modern dibuatnya visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

b. Misi

Misi kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan lingkungan hidup tercantum misi ke-5 yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

C. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, pada tahun 2016 dengan dasar Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018 dibentuklah 20 UPT pengelolaan sampah kecamatan yang meliputi 126 kelurahan.⁷⁹ UPT sebagaimana dimaksud adalah :

1. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Kemiling;
2. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Langkapura;

⁷⁹Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018, *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung*.

3. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Tanjung Karang Barat;
4. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Tanjung Karang Pusat;
5. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Tanjung Karang Timur;
6. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Teluk Betung Barat;
7. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Teluk Betung Timur;
8. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Teluk Betung Selatan;
9. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Teluk Betung Utara;
10. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Bumi Waras;
11. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Panjang;
12. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Kedaton;
13. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Rajabasa;
14. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Tanjung Seneng;
15. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Way Halim;
16. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Sukarame;
17. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Sukabumi;
18. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Enggal;
19. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Kedamaian;
20. UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Labuhan Ratu.

Dengan adanya Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ini adalah upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknik operasional dan/atau teknis penunjang Dinas Daerah dalam

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasil. . Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.⁸⁰

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pengelolaan Sampah kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah. Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud wilayah kerja UPT hanya mencakup batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPT lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Unit Pengelolaan Sampah kecamatan mempunyai fungsi:⁸¹

- a. Pelaksanaan operasional dan/atau penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pembinaan kegiatan tenaga fungsional dan/atau opsional/penunjang.
- c. Pelaksanaan dan pelayanan administratif ketatausahaan dan;

Agar dapat mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan pasal 5 Perda 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dipandang perlu dibentuk UPT tempat Pemrosesan Akhir

⁸⁰*Ibid*, Pasal 3

⁸¹*Ibid*, Pasal 4

Sampah Bakung Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016.

UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Bakung merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.⁸² UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Bakung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi pengolahan sampah, pengelolaan sampah, pengawasan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Tempat Pemrosesan Akhir sesuai kewenangan yang diberikan oleh dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan TPA sampah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan sampah (Pemadatan, pengkomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi) di TPA dan pemanfaatannya;
- c. Pengelolaan lokasi atau areal TPA;
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdaya guna;

⁸² Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 Pasal 3

- f. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- g. Pemeliharaan alat-alat berat, penataan zona TPA dan pengelolaan leachet/lindi (instalasi pengolahan air sampah);
- h. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
- i. Penyusunan program tetap (protap) pemrosesan sampah , yang meliputi jam buang, pengaturan zona buangan dan pengaturan kendaraan masuk;
- j. Penutupan sanitary landfill dengan tanah merah secara berkala;
- k. Pengkoordinasian pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap operasional di area TPA;
- l. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Walikota diatas Fungsi yang terdapat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 Tahun 2016 belum semua terlaksana. karena menurut keterangan dari bapak Rohendi selaku staf di Tempat Pemrosesan Akhir sampah bakung menjelaskan bahwa TPA bakung pada saat ini menggunakan system open dumping atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh. Pembuangan sampah ini sangat tidak maksimal. Berdasarkan penjelasan staf pengelola TPA bahwa pada awalnya pengelolaan sampah di TPA bakung menggunakan system

sanitary landfill namun pada kenyataan saat ini tidak digunakan lagi, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu karena keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang telah tua, oleh karena itu system open dumping yang digunakan kembali.⁸³

Adapun masalah yang ditemui dilapangan problem klasik sampah selalu dihadapi oleh penduduk dunia, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena usaha mengurangi volume sampah lebih kecil dari pada laju produksinya. Dengan volume timbunan sampah berlebihan menyebabkan kegiatan pengangkutan dan mengolah di TPA diluar kapasitas yang ada.

Seperti penjelasan yang diberikan oleh bapak Sani sebagai operator alat berat yang menerangkan bahwa total produksi sampah yang dihasilkan di Kota Bandar Lampung adalah kurang lebih 1.180 ton/hari. Jumlah sampah terangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung sekitar 560 ton/hari menggunakan 90 armada truk yang dikerahkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bakung. Truck sampah yang mengangkut sampah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir ditimbang terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan alat berat lalu sampah diproses dengan menggunakan system *open dumping*.⁸⁴

System *open dumping* tersebut dengan cara memamparkan sampah pada satu lokasi dibiarkan terbuka, dengan sistem *open dumping* tersebut akan menghasilkan air lindi yang lebih banyak dibandingkan *sanitary landfill* karena

⁸³ Wawancara pribadi dengan Bapak Rohendi staf di Tempat Pembuangan Akhir sampah Bakung, pada Tanggal 8 April 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Sani sebagai operator alat berat pada tanggal 8 April 2019.

air hujan akan lebih banyak meresap dalam tanah dibandingkan dengan *sanitary landfill* yang diberi lapisan tanah penutup. Lindi (*Leachate*) adalah cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi terlarut atau tersuspensi terutama hasil proses dekomposisi materi sampah atau dapat pula didefinisikan sebagai limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis. Lindi tidak akan keluar dari timbunan sampah bila kapasitas serap air dari sampah belum terlampaui. Kualitas dan kuantitas lindi tergantung dari banyak faktor, antara lain karakteristik dan komposisi sampah, jenis tanah penutup, iklim kondisikelembapan sampah serta umur/waktu penimbunan sampah. tanah penutup yang baik dapat mencegah atau meminimasi air hujan yang masuk kedalam lahan urug, terutama berasal dari air hujan. Penetrasi air yang masuk merupakan sumber terbentuknya lindi yang merupakan pencemar bagi lingkungan.

Namun pengelolaan sampah di TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai dampak langsung maupun tidak langsung yang disebabkan pencemaran tersebut bagi penduduk dilapangan perkotaan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi penumpukan sampah. dampak langsung adalah timbulnya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun

dampak tidak langsungnya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air selokan dan sungai karena terhalang timbunan sampah.



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Lumieux seorang pakar dari Prancis menyatakan kebijakan publik sebagai *“the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose resolutionship are structured. The entire process evolves over time”* yang artinya produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Walikota Kota Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis di awal pembukaan perda Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung.

Nasrobi Sugara menjelaskan bahwa adanya peraturan daerah nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah itu terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah kota Bandar Lampung untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Jadi adanya Perda No.05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandar Lampung, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi.

Setelah merancang peraturan daerah yang ditujukan untuk menerbitkan pengelolaan sampah. langkah berikutnya adalah pelaksanaan/implementasinya. Seperti yang di jelaskan oleh Samodra Wibawa implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* bagi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, dalam pandangan George C. Edward terbagi menjadi tiga yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam kebijakan

Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan mempermudah untuk diimplementasikan karena implementor akan mudah dalam memahami tindakannya. Komunikasi yang efektif ditandai dengan pemahaman aparat pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah. Mengacu pada Perda No. 15 Tahun 2015 pasal 6 huruf (a) bahwa pemerintah daerah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melakukan pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara penyuluhan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala kassubag umum di Dinas Lingkungan Hidup bahwa: “Sosialisasi dengan masyarakat pernah kita lakukan, penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R juga pernah kita lakukan kepada masyarakat kota Bandar Lampung. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya kami lakukan di kecamatan dan kelurahan, tapi memang kita tidak begitu sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat kota Bandar Lampung.”

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor yang penting untuk melaksanakan/ngimplementasikan suatu kebijakan. Walaupun kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Dalam implementasi Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia (*staff*) saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak UPT sebagai pelaksana lapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada masyarakat. Kesiapan akan aparat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini yang ada di tekankan kepada aktor terkait.
- b. Pada indikator sumber daya non manusia (fasilitas), pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT telah terealisasi cukup baik. Pemberian fasilitas berupa mobil satgas, dumtruck dan motor roda tiga ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan

pengelolaan sampah. Meskipun menurut staf Dinas Lingkungan Hidup masih merasa belum cukup dalam sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab dalam tugas dan pelaksana masing-masing pihak. Sikap pelaksana dilakukan secara sistematis dan terprosedur, hal ini dilakukan demi menunjang keberhasilan pelaksana kebijakan. Namun kerjasama yang dijalin harus lebih baik lagi agar dalam pelaksanaan kebijakan berjalan efektif untuk mencapai tujuan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada indikator yang ada sebagai berikut:

- a. Pada indikator *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah tersedia dengan baik. Pihak pelaksana sudah menjelaskan pelaksanaan sesuai petunjuk lapangan yang ada, sehingga pelaksanaan berjalan terstruktur dan sistematis
- b. Pada indikator fragmentasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari terjalinnya koordinasi dan pembagian tugas antara pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup, pihak UPT dan masyarakat. Kordinasi ini merupakan salah satu

hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah agar menghindari kesalahan yang dapat terjadi di lapangan.

Dari penjelasan teori George C. Edward Dinas Lingkungan Hidup telah memenuhi semua yang terdapat dalam teori tersebut, namun belum maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Dody setiawan selaku staf di Dinas Lingkungan Hidup ini menjelaskan fakta dilapangan bahwa pelaksanaan perda Nomor 05 Tahun 2015 itu sangat tidak maksimal, bahwa pelaksanaan perda hanyalah sebatas perda yang pelaksanaannya dan juga sosialisasi kemasyarakat sangat kurang sekali. Serta keberhasilan dalam perda itu sangat minim. Seperti adanya sanksi denda dalam perda untuk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan masih belum berjalan baik sampai saat ini sehingga menyebabkan volume sampah yang semakin hari semakin bertambah.

Namun salah satu staf Dinas Lingkungan Hidup bernama Dinda membenarkannya, ia menyatakan bahwa ketentuan sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah sembarangan sudah diterapkan seperti di salah satu lokasi makam pahlawan namun masih ada saja pelaku pembuangan sampah yang tidak terlihat, pelaku pembuang sampah yang tak terlihat disini maksudnya adalah pelaku pembuang sampah yang membuang sampah dijam-jam yang tidak ada petugas. Jika tertangkap pelaku pembuang sampah tersebut pasti akan langsung dikenakan sanksi.

Hal ini dapat dinilai bahwa penghambat berjalannya perda terlihat dari komponen pertama yaitu komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat

berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang baik, karna kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa adanya sanksi denda untuk para pelaku pembuang sampah yang akhirnya menimbulkan sikap sesuka hati dalam diri masyarakat untuk membuang sampah sembarangan.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Lampung yang ada di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung . Menurut pola pemerintahannya ialah pemerintah bersifat hierarki kekuasaan dari pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah dan undang-undang.

Perundang-undangan disebut juga dengan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai.

Atas hal-hal diataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta.

Adanya kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kemaslahatan manusia bersama-sama. Salah satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *Fiqh Siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti firman Allah SWT berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 59).*⁸⁵

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus berdasarkan.⁸⁷

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah

⁸⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-nisa ayat 59 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

⁸⁶ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm.9.

⁸⁷ Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.30

2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan seperti masalah kebersihan.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkaran yang kurang menyenangkan dan menyehatkan, memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat meyebabkan penyakit menular. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

bagi setiap orang yang tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap tersebut bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum
2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat

seolah-olah diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan.

3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan al-hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya disinilah nilai-nilai yang ada dalam syariat islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan tersebut. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri tidak terlepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁸⁸

⁸⁸ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS.Al-A'raf ayat 56 (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Ibnu Aqil berkata bahwa *Siyasah* adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya.⁸⁹

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan dimuka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain

⁸⁹Irwantoni, “peranan *Siyasah Syar’iyyah* dalam memahami nas-nas Agama”. Jurnal Al-Adalah, Vol. X No . 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012),h.270-271. (On-Line), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (9 januari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat islam.

Dalam kaidah *ushul fiqh* adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam *fath adz-dzari'ah* yang secara terminologi bisa dipahami bahwa *fath adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari *fath adz-dzari'ah* yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga kebersihan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola sampah dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.
2. Dalam Pandangan *fiqh siyasah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. *Khalifah* dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok bank sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah
3. Disarankan agar meningkatkan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul ,Khallaf, Wahhab, 1997. Al-Siyasah al-Syar'iyyah, Kairo: Dar al-Anshar.
- Ahmad Saebani Beni, 2015, Fiqh Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-rasyiddin. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, 2015, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Ali Zinnuddin , 2010, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Amirudin dan Zainal Asikin, 1991, pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. .
- Arikunto Suharsimi, 2006, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Bina Aksara.
- Ashshofa Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, H.A 2003, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kenana.
- Harsoyo, 1997, Pengertian Pengelolaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal Muhammad, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Grialia Indonesia.
- Iqbal Muhammad, 2014, Fiqh Siyasah-kontekstualisasi Doktrin Politik islam. Indonesia: Pranadamedia Group.
- J.Maleong Lexy, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

- Joko Subagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Juhaya S. Pradja, 2014, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Bandung: Pustaka Setia
- Mulyana Deddy, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Norobuko Cholid, Ahmadi, 1997, metode penelitian. Jakarta: Pt. Bumi aksara.
- Pulungan Sayuti, 1994, Fiqh Siyasah. Jakarta: RajaGrafindo..
- Ratna Sujarweni, 2015, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Riduwan, 2004, metode riset. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sammuddin Rapung, 2013, Fiqih Demokrasi. Jakarta: Gozian Press.
- Situmorang Jubair, 2012, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali Munawir, 1993, Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran), Edisi 5. Jakarta: UI Press. Sugiyono, 2010, *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, Metode penelitian kuantitatif,. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatini, Agung, Dwi Prihanto dan Michel Gelbert, 1996, Sampah dan Pengelolaannya. Malang: PPPGT/VEDC, 1996.
- Susiadi, 2015, Metode Penelitian, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung .
- Witarto, 2008, Memahami Pengolahan Data. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah. bab VI pasal 18 ayat (1). Jakarta
- Republik Indonesia . 1945. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1). Jakarta.

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pasal 1 angka (1) .

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Sampah, Bandar Lampung.

Republik Indonesia. 2018 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Kecamatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

C. Jurnal

Annisa Suciati “Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)” (Jakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Irwantoni, “peranan *Siyasah Syar’iyyah* dalam memahami nas-nas Agama”. Jurnal Al-Adalah, Vol. X No . 3, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2012),h.270-271. (On-Line), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (9 januari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Muhammad Sa’dulah “Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)” (Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga 2016).

D. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wali_Kota_Bandar_Lampung , diakses pada tanggal 25 maret 2019 pada pukul 19.00 Wib.

LAMPIRAN



1. Gambar Pola Pengumpulan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir



2. Gambar Sarana dan Prasarana





3. Gambar Dokumentasi Wawancara



